

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan negara Indonesia secara konstitusional adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya. Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di segala bidang ekonomi, kesehatan dan hukum. Adapun yang dimaksud antara lain tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga mencapai kesejahteraan; terciptanya peningkatan upaya kesehatan, sarana, dan prasarana, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, pembinaan, pengawasan, pengendalian oleh peningkatan kemandirian masyarakat melalui upaya provokatif dan preventif dalam peningkatan kualitas lingkungan, perilaku hidup bersih sehat dan pelayanan kesehatan; serta terciptanya supremasi hukum serta tertatanya sistem hukum daerah yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, dan aspiratif.¹

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat

¹ <http://www.bappeda.bogorcity.net/index.php>. Diakses pada tanggal 10 November 2019, pukul 20.00 WIB

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.² Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang disebut Narkoba. Narkoba merupakan permasalahan kompleks baik dilihat faktor penyebab maupun akibatnya. Penyebabnya merupakan kompleksitas dari berbagai faktor termasuk faktor fisik dan kejiwaan pelaku, serta faktor lingkungan baik mikro maupun makro. Bahaya narkoba sudah mencengkram Indonesia. Saat ini Indonesia menjadi pasar narkoba terbesar di level ASEAN.

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika maka dibentuklah Badan Narkotika Nasional (BNN). Pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN) sendiri berdasarkan atas landasan hukum yang telah ditetapkan, yang tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Badan Narkotika Nasional adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.³ Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional (BNN) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam ayat (2) Badan Narkotika Nasional (BNN) juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika,

³ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Peraturan tentang Narkotika telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 70 huruf (b) dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Peraturan Narkotika dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika. karena banyaknya peraturan tentang Narkotika maka penulis hanya membatasi penjelasan sesuai judul yang diangkat, yaitu Penerapan Pasal 70 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 35 tentang Mencegah dan Memberantas Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dikalangan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam rangka melakukan pencegahan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika ini adalah termasuk kejahatan yang besar, dan dampaknya sangat berpengaruh bagi kesehatan. Sehingga penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap dalam ASN harus dicegah dan diberantas.

Presiden Joko Widodo menegaskan permasalahan di Indonesia saat ini adalah Narkoba. Jokowi memaparkan, pengguna narkoba yang tewas akibat narkoba setiap harinya sekitar 50 orang. Ada 1,2 juta masyarakat Indonesia tidak bisa di rehabilitasi akibat narkoba.⁴ Dan 64 orang terancam eksekusi mati. Dunia remaja sangat rentan oleh pergaulan bebas . Karena

⁴ <https://www.selasar.com/politik/indonesia-darurat-narkoba>

terlalu bebasnya, seringkali kegiatan mereka tidak terkontrol oleh pihak sekolah. Jika hal tersebut berlanjut bukan tidak mungkin bahwa akan hal negative yang akan menimpa mereka. Salah satunya adalah terjerumusnya dalam dunia penyalahgunaan obat-obatan atau narkoba. Narkoba (Narkotika dan Obat / Bahan Berbahaya) saat ini telah meluas ke seluruh dunia dan dikonsumsi oleh berbagai kalangan, mulai dari yang remaja hingga yang tua. Sudah banyak yang mati sia-sia akibat over dosis.

Lemahnya hukum dan aparatnya telah menyebabkan makin meluasnya bahaya narkoba. Indonesia dihadapkan dengan masalah tingginya kasus narkoba. Menurut pihak luar, Indonesia tidak hanya sebagai jalur pengiriman *heroin* dan narkoba lainnya, tetapi juga sebagai salah satu tempat pemasaran narkoba. Konfederasi Asia Tenggara menentang dengan banyaknya perdagangan narkoba yang terjadi di Indonesia, contohnya di daerah Jakarta yaitu pabrik besar pembuatan ekstasi, dan contoh lainnya *heroin* dan *methamphetamine* (shabushabu) yang berasal dari Birma/Thailand.

Di kota-kota besar di Indonesia, penyebaran narkotika sudah tidak terkendali lagi. Badan Narkotika Nasional memperkirakan jumlah pengguna narkotika akan terus meningkat. Tahun 2015 diprediksi angka prevalensi pengguna narkoba mencapai 5,1 juta orang. Untuk itu bahaya ini harus dicegah dengan mengubah paradigma. Sudah saatnya pendekatan hukum perlu diimbangi pendekatan rehabilitas. Jika itu mampu dilakukan, mimpi Indonesia negeri bebas narkoba dapat tercapai. Saat ini, sebanyak

251 jenis narkoba baru sudah berkembang pada hamper 70 negara. Angka kematian akibat penyalahgunaan narkoba diperkirakan mencapai 104.000 orang yang berumur 15 tahun dan 263.000 orang yang berumur 64 tahun. Mereka meninggal akibat mengalami overdosis.

Peredaran gelap narkoba di Indonesia tampaknya semakin tidak terkendali. Indonesia masuk kategori darurat narkoba, dimana berdasarkan data hasil survey Badan Narkotika Nasional (BNN) total penyalahguna narkoba 2017 terdapat 3.376.115 orang dengan proporsi penyalahguna terbesar berdasarkan kelompok 59 % pekerja, 24 % pelajar, 17 % populasi umum. Proporsi berdasarkan jenis kelamin, 72 % laki-laki dan 28 % perempuan.⁵

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Gorontalo menyebutkan bahwa Peredaran Narkoba di Provinsi Gorontalo banyak dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara sehingga Peredaran Narkoba di Provinsi Gorontalo meningkat drastis dari angka 39 kasus di tahun 2016, menjadi 79 kasus pada tahun 2018. Sebanyak total 220 tersangka ditahan dan barang bukti seberat 5.390,946 gram dari berbagai jenis narkoba telah disita.

⁵ Badan Narkotika Nasional. Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi tahun 2017. Pusat Penelitian Data Dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Hal. 29.

Semakin tinggi tingkat kejahatan narkoba di Kota Gorontalo, maka semakin mempertanyakan peran Badan Narkotika Nasional (BNN). Sejauhmana pihak Badan Narkotika (BNN) dapat mengatasi penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba di Kota Gorontalo dan untuk itu dibutuhkan peran Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepolisian guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba. Dari pemaparan diatas kemudian menarik peneliti untuk melakukan penelitian tentang Penerapan Pasal 70 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 35 dalam Mencegah dan Memberantas Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba Dikalangan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Gorontalo. Sehingga judul dari penelitian ini adalah **“PENERAPAN PASAL 70 HURUF (b) UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG MENCEGAH DAN MEMBERANTAS PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DIKALANGAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO” Di BNN Provinsi Gorontalo.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut diatas, ditarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun perumusan masalah yang hendak dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 70 Huruf (b) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Gorontalo?
2. Bagaimana Implementasi Pasal 70 Huruf (b) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam Memberantas Peredaran Gelap Narkotika Dikalangan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Gorontalo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan dan kegunaan penelitian ingin dicapai dalam hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Pasal 70 Huruf (b) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Gorontalo.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Pasal 70 Huruf (b) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam Memberantas Peredaran Gelap Narkotika Dikalangan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Gorontalo.

D. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam rangka menunjang pengembangan ilmu bagi peneliti sendiri pada khususnya dan mahasiswa hukum pada umumnya.
2. Menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum pada khususnya dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Kota Gorontalo.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini bagi penulis dapat berguna sebagai penambah pengetahuan dalam hal permasalahan yang diteliti dan sebagai syarat untuk penulisan tugas akhir dan menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan wawasan maupun referensi bagi pemerintah daerah terutama menghadapi persoalan mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dikalangan Aparatur Sipil Negara Provinsi Gorontalo.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁶

Sedangkan penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, dengan hasil yang dicapai adalah untuk memberikan deskripsi mengenai apa yang seyogianya ada atas isu yang diajukan.⁷

Agar data dari suatu penelitian yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah perlu adanya ketepatan dalam memilih metode penelitian supaya sesuai dan mengenai pada masalah yang menjadi obyek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1) Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang memandang

⁶ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). Hal. 42.

⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Kencana. Hal. 41.

hukum sebagai suatu fenomena sosial yang dalam interaksinya tidak terlepas dari faktor-faktor non hukum.⁸

Penelitian yuridis sosiologis, dapat juga diartikan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).⁹ Dalam hal ini penelitian Penerapan Pasal 70 Huruf (b) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Mencegah dan Memberantas Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dikalangan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Dipilihnya penelitian kualitatif ini didasarkan alasan bahwa: (1) hukum dalam penelitian ini diartikan sebagai makna-makna simbolik sebagaimana termanifestasikan dan tersimak dalam dan dari aksi-aksi serta interaksi warga masyarakat; (2) agar dapat mengungkap dan mendapatkan makna yang mendalam dan rinci terhadap obyek penelitian dari informan.¹⁰

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini bersifat kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pada data-data yang dinyatakan

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro. 1994. *Metodologi Penulisan Hukum dan Jurimetri*. Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia. Hal. 11.

⁹ Soerjono Soekanto, *op.cit.* Hal. 42

¹⁰ Sutandyo Wignyosoebroto. 2006. *Keragaman Dalam Konsep Hukum, Tipe Kajian dan Metode Penelitiannya*. Semarang. Makalah Lokakarya, Yayasan Dewi Sartika.

responden secara lisan atau tertulis, dan juga perilakunya yang nyata, diteliti, dipelajari sebagai suatu yang utuh. Dengan menggunakan data yang dinyatakan secara verbal dan kualifikasinya bersifat teoritis yang diolah dan ditarik kesimpulannya dengan metode berfikir induktif. Penyajian secara induktif adalah metode penyajian yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

2) Sumber Data

Dalam sebuah penelitian suatu data dibedakan menjadi dua yaitu: data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Yang pertama disebut data primer atau data dasar (*primary data atau basic data*), dan data yang kedua dinamakan data sekunder (*secondary data*). Data primer diperoleh dari sumber pertama, yaitu perilaku warga masyarakat melalui penelitian. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku-buku harian, dan seterusnya

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer: merupakan data atau fakta-fakta yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan obyek

penelitian dan praktek yang dapat dilihat serta berhubungan dengan objek penelitian. Adapun yang termasuk dalam data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan di BNN Provinsi Gorontalo

- b. Sumber data sekunder : merupakan data yang tidak secara langsung diperoleh dari lokasi penelitian, atau keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh tetapi cara diperolehnya melalui studi pustaka, buku-buku literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian hukum ini.

3) Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah tahap yang penting dalam melakukan penelitian. Alat pengumpul data (*instrument*) menentukan kualitas data, dan kualitas data menentukan kualitas penelitian. Karena itu alat pengumpul data harus mendapat penggarapan yang cermat. Agar data penelitian mempunyai kualitas yang cukup tinggi, alat pengumpul datanya harus dapat mengukur secara cermat, harus dapat mengukur apa yang dapat diukur, dan harus dapat memberikan kesesuaian hasil pada pengulangan pengukuran.¹¹

¹¹ Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 65

Dalam rangka mendapatkan data yang tepat, penulis menggunakan teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

a. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah yang diteliti kepada seorang responden.¹² Wawancara dilakukan dengan situasi formal maupun informal.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu cara memperoleh data dengan mempelajari data dan menganalisa atas keseluruhan isi pustaka dengan mengkaitkan pada permasalahan yang ada. Adapun pustaka yang menjadi acuan adalah, buku-buku literatur, surat kabar, daftar atau tabel, kamus, peraturan perundang-undangan, maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini.

¹² *Ibid.* Hal. 82.

4) Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh atau data yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian dalam bentuk data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dengan demikian hasil penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas dan konkrit mengenai Penerapan Pasal 70 Huruf (b) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Mencegah dan Memberantas Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dikalangan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Gorontalo



G. Rencana Sistematika Penelitian

Dalam penyusunan penulisan penelitian Hukum kali ini, penulis akan menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menurut hal – hal yang melatar belakangi pemilihan topik dari penulisan skripsi dan sekaligus menjadi pengantar umum dalam memahami penulisan secara keseluruhan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kegunaan penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II ini penulis akan menguraikan landasan teori atau kajian teori yang mendukung hasil penelitian dalam membahas permasalahan yang diperoleh oleh penulis.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai jawaban terhadap permasalahan yang berhubungan dengan objek yang diteliti yakni : Penerapan Pasal 70 Huruf (b) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Mencegah dan Memberantas Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dikalangan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Gorontalo.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir atau penutup yang di dalamnya berisikan suatu kesimpulan dari hasil penelitian hukum.

